

PERSEPSI ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2014-2019 TERHADAP PILKADA LANGSUNG

Oleh:

**YULIKA N H
(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terhadap pilkada langsung. Melalui pemahaman pengetahuan tentang demokrasi lokal, pendapat tentang demokrasi lokal, dan evaluasi tentang demokrasi lokal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif kuantitatif. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner dimana populasinya adalah Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019. Responden dipilih dengan teknik perhitungan *proporsional random sampling* dengan total jumlah 30 responden. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 menyetujui pelaksanaan pilkada langsung. Satu hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah praktik politik uang yang tidak bisa dihindari.

Akhirnya diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai bahan evaluasi dan pendapat Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terkait persepsi pelaksanaan pilkada langsung.

Kata Kunci : Persepsi, Pilkada Langsung, Anggota DPRD Kota Semarang

**PERCEPTION from THE MEMBERS of PARLIAMENT SEMARANG
PERIOD YEAR 2014-2019 TOWARD THE DIRECT LOCAL LEADER
ELECTION
YULIKA N H
(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP)**

ABSTRACT

This research is done to know perception from the Members of Parliament Semarang Period Year 2014-2019 toward the direct local leader election. Through understanding the knowledge of local democracy, opinions about local democracy, and evaluation of the local democracy. This study used a quantitative approach with quantitative descriptive type. These data were obtained through a questionnaire toward the the population of Semarang City Council Member for the Period of 2014-2019. Respondents were selected by random sampling technique of proportional calculation with total number of 30 respondents. Furthermore, the data analysis was performed by using SPSS 16.0.

The results of this study showed that the majority of the Members of Parliament of Semarang the year period 2014-2019 approve the implementation of direct elections. One thing that becomes an obstacle in the implementation of direct elections is the practice of money politics that is unavoidable.

Finally, it is hoped that this research result can be a means of evaluation and opinion of Semarang City Council Member the year period 2014-2019 related to perception from the Members of Parliament Semarang Period Year 2014-2019 toward the direct local leader election.

Keywords: Perception, Direct Election, Member of Parliament Semarang

Pendahuluan

Pilkada langsung itu sendiri merupakan pemilihan kepala daerah baik itu walikota, bupati, gubernur maupun anggota legislatif yang dilakukan secara langsung oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Hal ini berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4).

Mengapa penulis tertarik memilih untuk meneliti persepsi Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terhadap pelaksanaan pilkada langsung? Hal ini dikarenakan sebelum adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007 sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh Anggota DPRD. Sehingga, kepala daerah yang terpilih bertanggungjawab penuh kepada Anggota DPRD bukan kepada masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.

Pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia berawal dari sebuah landasan berpikir yang ideal, yakni melakukan pemilihan secara demokratis sehingga dapat melahirkan pasangan pejabat eksekutif yang berkualitas dan mampu mengelola pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan produktif serta mampu menyejahterakan seluruh rakyat.¹

Menurut pendapat Lili Romli tentang Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan melalui perwakilan. Kelebihan tersebut, yaitu: (i) memutus politik oligarki yang dilakukan sekelompok elite dalam penentuan kepala daerah; (ii) memperkuat *checks and balances* dengan DPRD; (iii) legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat; (iv) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel; dan (v) menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat.²

Menurut Kumolo pada awalnya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 26 September 2014 menjadi UU. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hasil dari rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa pilkada langsung yang hampir sepuluh tahun berjalan sejak diselenggarakan pada Juni 2005 sudah berakhir. Sebelum sampai pada putusan tersebut, fraksi-fraksi di DPR terbelah menjadi dua yakni Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP

¹Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.

²Lili, Romli. "Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia". *Pusat Penelitian Politik Year Book 2007: Democracy Pilkada*. Jakarta:LIPI Press.

menginginkan pilkada melalui DPRD. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Hanura menginginkan hal sebaliknya yakni pilkada langsung. Terbelahnya fraksi-fraksi tersebut menimbulkan pro kontra yang cukup keras di masyarakat, baik yang mendukung pilkada melalui DPRD maupun pilkada langsung. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang diperdebatkan dalam pilkada langsung?

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif adalah untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terhadap pelaksanaan pilkada langsung. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 dan objek penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu “Persepsi Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung” di Kantor DPRD Kota Semarang yang berada di Balai kota Semarang.

Untuk menentukan responden digunakan teknik pengambilan sampel sistem *proportional random sampling*, yakni pengambilan sampel yang memperhatikan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Dari hasil perhitungan menggunakan sistem *proportional random sampling*, jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 30 sampel.

Sumber data yang akan penulis gunakan, terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh responden (Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019), wawancara dengan pihak KPU Kota Semarang selaku pihak penyelenggara pilkada langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti memanfaatkan data-data dalam laporan, dokumen, dan literatur yang terkait dengan persepsi pilkada langsung.³

Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan studi pustaka, sebagai berikut:

1. Kuesioner, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang diteliti.
2. Studi pustaka, yakni membaca sumber-sumber literatur mengenai tema yang dikaji tentang perilaku memilih pemilih pemula, dan teori-teori sosial yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan informasi tertulis lainnya yang membahas tentang perilaku memilih.

Metode terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Data yang diperoleh dari jawaban responden akan dimulai dengan skala yang telah ditentukan. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau memilah jawaban dari para responden dari hasil angket yang sudah disebar dan mengelompokkan jawaban para responden.
2. Coding, merupakan pemberian tanda-tanda atau kode dalam setiap jawaban yang telah diberikan kepada responden.
3. Tabulating, merupakan proses dimana data yang sudah diperoleh dari angket dan sudah dikelompokkan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan secara langsung hasil penelitian tersebut. Tabulasi disini dapat berbentuk persentase dari data statistik.

Setelah langkah-langkah diatas selesai, selanjutnya adalah menganalisis data, analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisa data kuantitatif ini diperuntukkan untuk menjawab masalah penelitian yaitu Persepsi Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 terhadap Pilkada Langsung.

³Siregar, Syofian. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menyatakan mengetahui pemahaman pengetahuan yang berhubungan dengan demokrasi lokal. Pengetahuan tersebut meliputi definisi pilkada langsung dan tidak langsung, pelaksanaan pilkada langsung, kelebihan pilkada langsung, dan setuju tidaknya sistem pemilu di Amerika diterapkan di Indonesia.

Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, hal ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-70 tahun memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang berpendidikan Diploma dan S2/S3 memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi agama bahwa responden yang beragama Katholik memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi status kependudukan bahwa responden yang berpenduduk dari kota lain memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%. Terakhir dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi Demokrat, Nasdem, PAN, PDIP, PKB, PPP memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%.

Mayoritas responden menyatakan pendapat pribadi yang berhubungan dengan demokrasi lokal. Pendapat tersebut meliputi alasan diubahnya pilkada langsung menjadi tidak langsung, implikasi pilkada langsung, pelaksanaan pilkada langsung meskipun banyak konflik, perbedaan kinerja kepala daerah, kemajuan sistem pemerintahan melalui pilkada langsung, ketidaksetujuan anggota partai terhadap UU Pilkada Langsung, cara pencegahan politik uang, kesesuaian kinerja kepala daerah, pentingnya akuntabilitas bagi kepala daerah, dan jika pelaksanaan pilkada, pilpres, dan pileg dilaksanakan dalam satu waktu.

Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, hal ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-70 tahun memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang berpendidikan Diploma memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi agama bahwa responden yang beragama Katholik memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%,

segi status kependudukan bahwa responden yang berpenduduk dari kota lain memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%. Terakhir, dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi Nasdem, PAN, PKB memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, sedangkan Fraksi PPP memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%.

Mayoritas responden menyatakan evaluasi dari pelaksanaan demokrasi lokal. Evaluasi tersebut meliputi asas Luberjurdil dalam sistem pilkada langsung, efektif tidaknya sistem pilkada langsung, implikasi fenomena figur dalam pemilu, penyebab Kota Semarang aman selama pelaksanaan pilkada, penerapan sistem pemilu negara maju di dalam sistem pemilu di negara berkembang.

Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, hal ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-70 tahun memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang berpendidikan Diploma memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi agama bahwa responden yang beragama Katholik memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat rendah sebesar 100,0%, segi status kependudukan bahwa responden yang berpenduduk dari kota lain memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat rendah sebesar 100,0%. dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi Demokrat dan Nasdem memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, sedangkan Fraksi PPP memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%.

Kesimpulan

Orientasi kognitif meliputi pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Orientasi kognitif dapat dilihat dari tingkat pengetahuan seseorang tentang pengertian pilkada langsung dan tidak langsung, perlunya dilaksanakan pilkada langsung, kelebihan pilkada langsung, dan setuju tidaknya sistem pemilu di Amerika Serikat diterapkan di Indonesia. Pada orientasi kognitif ditemukan bahwa pengetahuan tentang pilkada langsung menurut responden yang berada di bawah naungan fraksi adalah pengetahuan sebesar 3,3% terdapat pada kategori sangat rendah, rendah, dan tinggi. Sedangkan pengetahuan sebesar 90,0%

tentang pilkada langsung menurut fraksi masuk pada kategori sangat tinggi.

Orientasi afektif menunjukkan aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Perasaan tersebut dapat menerima maupun menolak terhadap sistem politik tersebut. Orientasi afektif dapat dilihat dari tingkat pendapat seseorang tentang alasan diubahnya pilkada langsung menjadi tidak langsung, implikasi pilkada langsung, pelaksanaan pilkada langsung yang menimbulkan banyak konflik, kinerja kepala daerah, kemajuan sistem pilkada langsung, setuju tidaknya anggota partai terhadap UU Pilkada, cara mencegah politik uang, kesesuaian kinerja kepala daerah, pentingnya akuntabilitas bagi kepala daerah. Terakhir, jika pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada dilaksanakan dalam satu waktu. Pada orientasi afektif ditemukan bahwa pendapat tentang pilkada langsung menurut responden yang berada di bawah naungan fraksi adalah sebesar 6,7% pendapat masuk kategori sangat rendah, pendapat sebesar 3,3% masuk kategori rendah, pendapat fraksi sebesar 30,0% tinggi, dan pendapat sebesar 60,0% masuk kategori sangat tinggi.

Orientasi evaluatif berkaitan dengan nilai moral seseorang terhadap sistem politik. Orientasi evaluatif ditentukan evaluasi moral pada diri seseorang. Orientasi evaluatif dapat dilihat dari tingkat evaluasi seseorang tentang pelaksanaan pilkada langsung yang menganut asas Luberjurdil, efektif tidaknya sistem pilkada langsung, implikasi fenomena figur dalam pemilu, penyebab Kota Semarang aman dalam pelaksanaan pilkada langsung, dan Indonesia menganut sistem pemilu negara maju untuk menghilangkan praktik politik uang. Pada orientasi evaluatif ditemukan bahwa evaluasi tentang pilkada langsung menurut responden yang berada di bawah naungan fraksi adalah evaluasi sebesar 6,7% masuk kategori sangat rendah, evaluasi sebesar 20,0% masuk kategori rendah dan tinggi, kemudian evaluasi sebesar 53,3% masuk kategori sangat tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Persepsi Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 terhadap Pilkada Langsung” di Kantor DPRD Kota Semarang, ditemukan

beberapa kelemahan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan saran berikut:

1. Terkait politik uang dalam pilkada langsung, perlu diupayakan transparansi/keterbukaan masalah anggaran. Harus jelas anggaran yang dimiliki calon kepala daerah. Jadi, masyarakat dapat mengetahui anggaran yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut. Sehingga akan ketahuan calon kepala daerah yang melakukan politik uang terutama dari luar anggaran yang dimiliki.

2. Terkait kualitas calon kepala daerah, perlu diupayakan calon kepala daerah yang mempunyai kualitas yang sangat baik seperti memiliki jiwa pemimpin, bertanggungjawab, adil, memahami tentang politik, berlatar pendidikan politik, dan mementingkan rakyat. Bukan calon kepala daerah yang mempunyai kualitas rendah dan memiliki banyak uang.

Daftar Pustaka

- _____. "Pemilihan Umum di Amerika Serikat". Diakses pada tanggal 4 April 2016, pada pukul 21.00 WIB.
- _____. "Kota Semarang." Diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 20.00 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
- _____. "Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014". Diakses pada tanggal 4 April 2016 pukul 10.00 WIB.
- _____. "Pemilihan Umum Presiden 2009". Diakses pada tanggal 4 April 2016 pukul 09.35 WIB.
- _____. "Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014". Diakses pada tanggal 4 April 2016, pada pukul 10.00 WIB.
- _____. "Pemilu Umum Legislatif Indonesia 2009." Diakses pada tanggal 4 April 2016 pukul 09.30 WIB.
- _____. *Perolehan Suara Pilwakot 2015*. Diakses pada tanggal 1 Juni 2016, pukul 20.10 WIB <http://kpu-semarangkota.go.id/PEROLEHAN-SUARA-PILWAKOT-2015>
- _____. *Pemilihan Umum Tahun 2004*. diakses pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 06.00 WIB. http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=28&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
- _____. *Pemilihan Umum Tahun 2014*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 06.00 WIB. <http://kepuustakaan->

presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=33&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=

Buku Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2015

Dahl, Robert A..1985.*Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* terjemahan oleh Sahat Simamora.Jakarta:Rajawali

Daymon, CristinedanImmy Holloway. 2008. *Metode-dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta:PTBentangPustaka. Hal 369

Fitriyah.2005."Sistem dan Proses Pilkada Langsung".*Analisis CSI*, Vol.34, No.3.

Gaffar, Affan.2006.*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*..Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Ghofar. *Sistem Politik Inggris dan Pemilu di Inggris*. Diakses pada tanggal 4 April 2016, pada pukul 18.00 WIB. <http://ghofar1.blogspot.co.id/2013/11/sistem-politik-inggris-dan-pemilu-di.html>

Global Lave Bookx. *Pengertian dan Definisi Metode Kuantitatif menurut Ahli*. Diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 02.40 WIB. <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-definisi-metode.html>

Hasil wawancara peneliti dengan Kharis Hidayat selaku Anggota Komisioner Divisi Pemutakhiran KPU Kota Semarang pada tanggal 24 Agustus 2015 di Kantor KPU Kota Semarang.

Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.

<http://www.dakwatuna.com/2014/09/26/57394/13-alasan-mengapa-pemilukada-harus-melalui-dprd/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Amerika_Serikat

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

Institusi Otonomi Daerah. *Daftar Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Telah Melaksanakan Pemilukada Tahun 2005 s.d. 2014*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2016, pukul 19.00 WIB. www.institutotda.com/uploads/20150908103211.pdf

- Kemendagri. *Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri*. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 20.00 WIB. <http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jenderalotonomi-daerah-departemen-dalam-negeri>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- KPU Kota Semarang. *Perolehan Suara Pilwakot 2010*. Diakses pada tanggal 1 Juni 2016, pukul 20.10 WIB. <http://kpu-semarangkota.go.id/Hasil-Pilwakot-2010>
- Kumolo, Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.
- Landasan Teori. *Pengertian Perilaku Politik Definisi Menurut Para Ahli dan Faktor yang Mempengaruhi*. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 12.30 WIB. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perilaku-politik-definisi.html>
- Lembaga Survei Indonesia. *Laporan Rilis Survei Pro Kontra Pilkada Langsung*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2016, pukul 06.55 WIB. <http://www.lsi.or.id/riset/435/Rilis-Survei-Pro-Kontra-Pilkada-Langsung>
- Lili, Romli. "Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia". *Pusat Penelitian Politik Year Book 2007: Democracy Pilkada*. Jakarta: LIPI Press.
- Mahasiswa KKN/PPL UNY. 2012. *Materi Pembelajaran PKN Kelas XI SMA Negeri 1 Depok*. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 12.00 WIB. <http://pknprimordia2012.blogspot.co.id/p/materi-pembelajaran.html>
- Masaudi, Nanang. *13 Alasan Mengapa Pemilukada Harus Melalui DPRD*. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016, pukul 19.00 WIB.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Pemilihan Umum Tahun 1999*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 06.00 WIB. http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=

- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. FISIP UI
- Saraswati, Retno. *Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya*. Diakses pada tanggal 9 Februari 2016, pukul 19.00 WIB. http://www.undip.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:pilkada-langsung-tidak-menciptakan-kesejahteraan-rakyat-&catid=78
- Sejarah Negara Com. *Pemilu Indonesia Tahun 1955 sampai 2004*. Diakses pada tanggal 3 April 2016 pukul 18.00 WIB. <http://www.sejarah-negara.com/pemilu-indonesia-tahun-1955-sampai-2004/>
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. 2010. *Modul untuk Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Siregar, Syofian. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soleh, Ahmad. *Plus Minus Pilkada Langsung dan Melalui DPRD*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 20.00 WIB. http://www.kompasiana.com/asapemuda/plus-minus-pilkada-langsung-dan-melalui-dprd_54f482627455137b2b6c8bf1
- Sudibyo, Anton. *Dari Pilkada ke Pilkada (1): Pilwakot 2005, Sukma 'Rampok' Semarang*. Diakses pada tanggal 1 Juni 2016, pukul 20.00 WIB. <http://metrosemarang.com/dari-pilkada-ke-pilkada-1-pilwakot-2005-sukma-rampok-semarang>
- Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparman. 2007. "Konflik Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)". *Tesis, Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana UGM, Yogyakarta*.
- Surat Keputusan KPU No. 574/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tanggal 28 September 2014
- Suryatmaja M, I.B.G. 2003. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung", dimuat dalam *Roundtable Discuss*. Jakarta: Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (Center for Local Government Innovation). Hal 25
- Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Umum*. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 11.20 WIB. <http://myoretoret.blogspot.co.id/2012/11/persepsi.html>
- Walgito, Bimo. 2004. *Psikologi Sosial*. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016, pukul 11.00 WIB. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50999/4/Chapter%20II.pdf>

Warsito. *Keuntungan Pilkada Langsung*. Diakses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 10.00 WIB.
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/13/opi3.htm>

Wasistiono,Sadu. 2005. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi”. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu.

Wikipedia. “Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat”. Diakses pada tanggal 8 Maret 2016, pukul 07.28 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Interpelasi_Dewan_Perwakilan_Rakyat